

ANALISIS DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI DESA MUKTI JAYA KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN

Analysis Of Subsidized Fertilizer Distribution In Mukti Jaya Village, Muara Telang District, Banyuasin Regency

Agoes Thony Ak¹, Nur Ahmadi¹, I Wayan Senor²

^{1),2),3)}Program Studi Magister Agribisnis Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang
 Email : agoes_thony@unisti.ac.id¹, kecedekan@yahoo.com¹,
 wayanaryamahendra457@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem distribusi dan mekanisme pennebusan pupuk bersubsidi berbasis e-RDKK di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2024 dengan pendekatan studi kasus, yang dipilih secara purposive karena desa ini merupakan wilayah dengan dominasi penduduk berprofesi sebagai petani penerima subsidi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu Kepala Dinas Pertanian, serta informan pendukung seperti distributor, pengecer, ketua kelompok tani, dan petani. Analisis data dilakukan menggunakan dua metode: analisis isi kualitatif untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan realitas di lapangan, serta analisis deskriptif kualitatif untuk memetakan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan sistem e-RDKK telah berjalan relatif baik. Pengelolaan dilakukan melalui musyawarah pengurus kelompok tani dalam merumuskan dan memverifikasi dokumen RDKK. Tahapan distribusi dimulai dari perencanaan jumlah kebutuhan pupuk, penyaluran sesuai regulasi, pengawasan efektivitas, monitoring dan evaluasi oleh lembaga terkait, serta verifikasi akhir untuk memastikan pupuk benar-benar sampai dan digunakan sesuai kebutuhan. Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas serta hambatan implementasi kebijakan subsidi pupuk di tingkat petani, dan dapat menjadi masukan bagi perbaikan sistem distribusi pupuk di masa depan.

Kata Kunci: *Distribusi Pupuk, E-RDKK, Kebijakan Pertanian, Kelompok Tani, Pupuk Bersubsidi, Studi Kasus*

Abstract

This study aims to analyze the distribution system and the mechanism of subsidized fertilizer redemption based on the e-RDKK system in Mukti Jaya Village, Muara Telang Subdistrict, Banyuasin Regency. The research was conducted in April 2024 using a case study approach, purposively selected because the village is predominantly inhabited by farmers who are recipients of fertilizer subsidies. Data were collected through interviews with key informants, namely the Head of the Agriculture Office, as well as supporting informants such as distributors, retailers, farmer group leaders, and farmers. The data analysis was carried out using two methods: qualitative content analysis to assess the alignment between policy and field reality, and qualitative descriptive analysis to map the mechanisms of subsidized fertilizer distribution. The results indicate that the

implementation of subsidized fertilizer distribution based on the e-RDKK system has been relatively effective. Management is carried out through deliberations among farmer group administrators in formulating and verifying the RDKK documents. The distribution process includes several stages: planning the quantity of fertilizer needed, distribution in accordance with regulations, effectiveness supervision, monitoring and evaluation by relevant institutions, and final verification to ensure that the fertilizer is delivered and used according to the farmers' actual needs. This research provides a comprehensive overview of the effectiveness and obstacles in implementing subsidized fertilizer policies at the farmer level and can serve as input for improving the fertilizer distribution system in the future.

Keywords: *Fertilizer Distribution, E-RDKK, Agricultural Policy, Farmer Groups, Subsidized Fertilizer, Case Study.*

PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap ketersediaan pupuk salah satunya memberikan subsidi untuk sektor pertanian (Zahara, 2021). Subsidi adalah salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk memberi suatu barang atau jasa menyangkut kepentingan hidup orang banyak (Wardana, 2020). Salah satu subsidi di sektor pertanian yaitu subsidi pupuk (Setyawati & Yasa, 2018). Pupuk Bersubsidi merupakan input produksi yang berada dalam pengawasan dan pengadaan serta penyalurannya dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian (Heliaantoro & Juwana, 2018). Pupuk bersubsidi merupakan suatu bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para petani guna untuk meningkatkan mutu dari hasil pertanian atau perkebunan di Indonesia (Chakim, 2020).

Pupuk merupakan salah satu faktor utama yang ikut menentukan tingkat kesuburan tanah dan tingkat pertumbuhan tanaman (Raksun et al., 2019). Jadi untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal maka petani juga harus bisa menyediakan/mencukupi ketersediaan/keperluan pupuk yang memadai. Dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa ada kecenderungan untuk mendapatkan hasil yang optimal maka juga diperlukan ketersediaan pupuk dalam jumlah yang cukup.

Penggunaan pupuk di desa mukti jaya sudah pasti sangat intensif. Terkait hal tersebut, sering adanya kegaduhan dan keribubutan para petani dikarenakan tidak mendapatkan bagian pupuk, sebab namanya tidak tercantum di dalam e-RDKK (elektronik Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok). Dapat kami sampaikan bahwa e-RDKK ini merupakan lembaran surat yang di keluarkan oleh dinas pertanian dan ketahanan pangan yang isinya memuat daftar nama-nama petani dalam suatu kelompok tani yang bisa/berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Nama-nama para petani tersebut di usulkan oleh kelompok tani melalui petugas penyuluh pertanian ke instansi/dinas pertanian dan ketahanan pangan. Yang sering menjadi permasalahan adalah seringkali nama-nama yang sudah diusulkan oleh kelompok tani kedalam form e-RDKK itu banyak yang tidak keluar, ini lah yang sering menjadi keributan di tingkat petani karena merasa adanya ketidakadilan, dimana petani tersebut secara defacto memiliki lahan pertanian tetapi tidak bisa menebus pupuk dikarenakan namanya tidak tercantum di dalam e-RDKK tersebut.

Kebijakan pupuk bersubsidi yang dibuat pemerintah tentu saja memiliki kendala. Secara umum tentunya pemerintah dalam menetapkan kebijakan memberikan subsidi pada harga pupuk adalah dengan maksud yang baik agar dapat tercapainya efisiensi harga dan biaya produksi pertanian pada tingkat petani, tetapi hal-hal yang sering timbul menjadi permasalahan pada tingkat petani adalah terjadinya hal teknis yang diluar dari pada

kebijakan itu sendiri, seperti misalnya adanya input data yang tidak akurat didalam pembuatan e-RDKK, seperti misalnya: 1). Nama anggota kelompok tani yang sudah di usulkan untuk diterbitkan di dalam e-RDKK namun kenyataannya tidak terinput, sehingga namanya tidak masuk di dalam e-RDKK sehingga petani tersebut tidak bisa menebus pupuk subsidi yang diharapkan. 2). Kekeliruan atau kesalahan dalam input data e-RDKK (nama atau nomor induk KTP salah ketik/ diketik tidak sebagaimana mestinya, ini menyebabkan petani yang bersangkutan harus mendapatkan surat keterangan validasi dari instansi terkait (pemerintahan Desa dan Kecamatan). 3). Surat e-RDKK dari kelompok tani itu datang/diterbitkannya/dikeluarkan dari Dinas tertentu tidak tepat waktu/terlambat, hal ini mengakibatkan petani menjadi terlambat pula di dalam menebus/membeli pupuk bersubsidi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pendistribusian dan sistem penebusan pupuk bersubsidi di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Maka dengan ini penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi berdasarkan sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin”

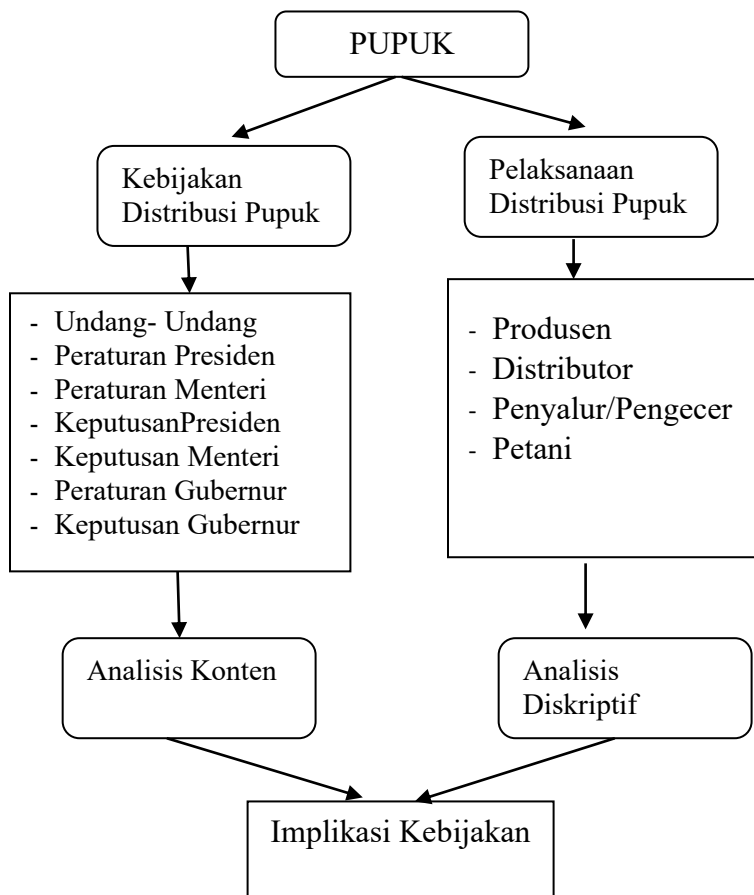
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Penentuan lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (*Purposive*) dengan pertimbangan bahwa Desa Mukti Jaya merupakan desa dengan penduduk sebagian besar berprofesi sebagai petani yang mendapatkan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Pengumpulan dan pengambilan data di lokasi penelitian dilaksanakan pada bulan April 2024. Penelitian menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus adalah pendekatan penelitian yang mendalam, terfokus pada satu unit atau kasus tertentu yang dianggap mewakili fenomena yang diteliti (Assyakurrohim et al., 2022). Tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang komprehensif, kontekstual, dan mendalam terhadap objek yang diteliti, baik berupa individu, kelompok, lembaga, peristiwa, atau program. Menurut Nur'aini (2020), studi kasus adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak jelas. Studi kasus sangat bermanfaat digunakan dalam penelitian yang ingin menjawab pertanyaan “how” dan “why”.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu metode *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Campbell et al., 2020). Menurut Sugiyono (2013) Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Dalam penelitian ini, untuk melihat distribusinya peneliti mengambil sampel dari informan kunci seperti Kepala Dinas Pertanian, dan sebagai informan pendukung adalah Distributor, Pengecer, Ketua Kelompok Tani dan Petani. Berikut kerangka pemikiran alur penelitian ini :



Gambar 1. Diagram Model Pendekatan tentang Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi berdasarkan sistem Elektronik Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Adapun alat analisis yang akan digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian distribusi pupuk bersubsidi di Desa Mukti Jaya yaitu ada dua. Yang pertama untuk menganalisis kebijakan pupuk bersubsidi menggunakan alat analisis isi kualitatif atau content. Analisis isi kualitatif atau biasa disebut dengan analisis isi media kualitatif lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Untuk alat analisis yang kedua yaitu menganalisis mekanisme perolehan pupuk bersubsidi dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah dengan cara mengidentifikasi mekanisme pendistribusian pupuk yang terjadi dilapangan pada setiap saluran yang dilewati oleh produsen hingga ke konsumen akhir yaitu petani di daerah penelitian. Kemudian hasil dari analisis content dan analisis deskriptif maka dilakukan komparatif atau perbandingan, untuk melihat proses pelaksanaan distribusi pupuk apakah sudah sesuai dengan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

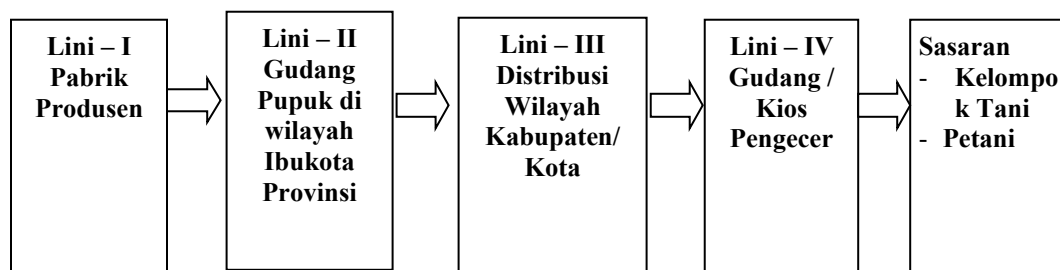
Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Indonesia

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang disalurkan dari produsen hingga sampai ke petani dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai proses pendistribusiannya melalui kebijakan dan peraturan yang telah

ditetapkan, agar penyaluran pupuk bersubsidi lancar dan dapat memenuhi kebutuhan petani di Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2019 berisi mengenai pedoman untuk mendapatkan pupuk subsidi bagi petani, yaitu pada pasal 1 ayat 6 berbunyi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan Kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).

Pasal 3 ayat 1 dan 2 yang berisi mengenai pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik, pupuk anorganik yang digunakan yaitu Urea, SP-36, ZA dan NPK dan untuk pupuk organiknya yaitu pupuk kandang. Pasal 5 ayat 1 dan 2 berisi tentang pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani, petani yang melakukan usaha tani sub sector tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan dengan luasan lahan kurang dari 2 (dua) hektare. pupuk bersubsidi dilarang diperuntukan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian secara luas. Untuk memenuhi kebutuhan petani tentu perlu diatur mengenai alokasi pupuk bersubsidi yang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota yang mengacu pada serapan pupuk tahun sebelumnya. Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi jika terjadi kekurangan atau kelebihan pemenuhan pupuk bersubsidi maka bisa di realokasi antarwilayah dengan tetap memperhatikan alokasi yang tersedia. Kemudian dalam peraturan ini juga mengatur mengenai Harga Eceran Tertinggi dimana pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai HET dengan tujuan agar petani bisa mendapatkan harga pupuk bersubsidi yang terjangkau.

Selain itu agar petani mendapatkan pupuk bersubsidi secara tepat waktu pemerintah juga mengaturnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pengaturan sistem distribusi pupuk ini dengan harapan agar petani dapat memperoleh pupuk dengan 6 tepat, yaitu : tempat, jenis, waktu, jumlah, mutu, dan harga yang sesuai dengan isi pasal 1 ayat 15. Saluran pemasaran pupuk bersubsidi Urea, ZA, SP-36, NPK, Organik pada umumnya melibatkan produsen, distributor dan pengecer. Untuk hubungan kerja antara produsen pupuk dengan distributor diatur dengan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) yang sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2. Kemudian untuk hubungan kerja antara distributor dengan pengecer juga diatur dengan SPJB yang terdapat dalam pasal 5 ayat 4. Model pendistribusian pupuk subsidi berdasarkan kebijakan pemerintah saat ini memiliki tahapan, seperti gambar dibawah ini.



Gambar 2. Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan tahapan diatas, proses pendistribusian pupuk bersubsidi berawal dari lini I yaitu produsen pupuk dalam hal ini ada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda. Selanjutnya ke lini II yaitu gudang pupuk di wilayah Ibukota di masing-masing Provinsi di Indonesia, kemudian ke lini III yaitu distributor wilayah Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam jumlah besar.

Selanjutnya ke lini IV yaitu pengecer resmi yang berada di wilayah kecamatan dan/atau desa yang sudah ditunjuk oleh distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/atau petani. Kemudian di distribusikan ke sasaran utama dari program pupuk bersubsidi yaitu kelompok tani dan petani.

Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Banyuasin

Proses distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuasin berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dari kunci informasi yaitu pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin yang menangani pupuk bersubsidi, kemudian dengan Distributor, Pengecer dan Ketua Kelompok Tani, di peroleh alur distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuasin dan lembaga distribusi yang terlibat dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan hasil wawancara untuk program pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuasin adalah kartu tani. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan dilapangan mengatakan bahwa kartu tani ini rencana akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, dengan adanya kartu tani diharapkan dapat lebih memudahkan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena kartu tani ini menggunakan sistem baru dan tentunya masih perlu melakukan adaptasi inovasi baru, agar petani tidak kebingungan dalam mengaplikasikannya.

Berdasarkan informasi yang sudah diungkapkan informan, untuk mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk di rencanakan program pupuk bersubsidi yaitu kartu tani. Namun untuk saat ini masih banyak petani yang tidak tau mengenai kartu tani. Pupuk bersubsidi memiliki dampak yang positif, karena hal ini sesuai dengan hasil wawancara dilapangan yang merupakan ketua kelompok tani berpendapat bahwa dengan adanya pupuk bersubsidi ini petani merasa sangat terbantu dalam mengurangi modal produksi karena harganya cukup terjangkau.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya program pupuk subsidi yang telah dibuat oleh pemerintah memiliki dampak yang positif, karena sangat membantu petani dalam mengurangi modal produksi saat masa tanam. Menurut ketua kelompok menyatakan juga bahwa sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam distribusi pupuk bersubsidi adalah besarnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan, pendistribusian pupuk yang belum sesuai dengan prinsip enam tepat, serta adanya penyusutan akibat bongkar muat pupuk saat distribusi pupuk berlangsung, serta infrastruktur dan keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala yang dihadapi penyalur di lini IV.

Masalah ini juga terjadi dalam proses distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuasin dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang merupakan pengecer, mengatakan terdapat biaya transportasi yang dikeluarkan oleh lembaga distribusi berbeda-beda sesuai dengan jarak antar gudang. Hal ini tentunya menyebabkan adanya biaya transportasi yang dibebankan kepada petani, serta menyebabkan harga jual lembaga distribusi sulit mencapai atau sama dengan HET yang ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan informan yang merupakan pengecer, bahwa harga dari pupuk subsidi sulit untuk mencapai harga yang sama dengan HET dikarenakan terdapat biaya transportasi dari gudang ke pengecer. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Pupuk Urea = Rp.1.800,00 per kg
- b. Pupuk SP-36 = Rp.2.000,00 per kg
- c. Pupuk ZA = Rp.1.400,00 per kg
- d. Pupuk NPK = Rp.2.300,00 per kg, dan
- e. Pupuk Organik = Rp.500,00 per kg.

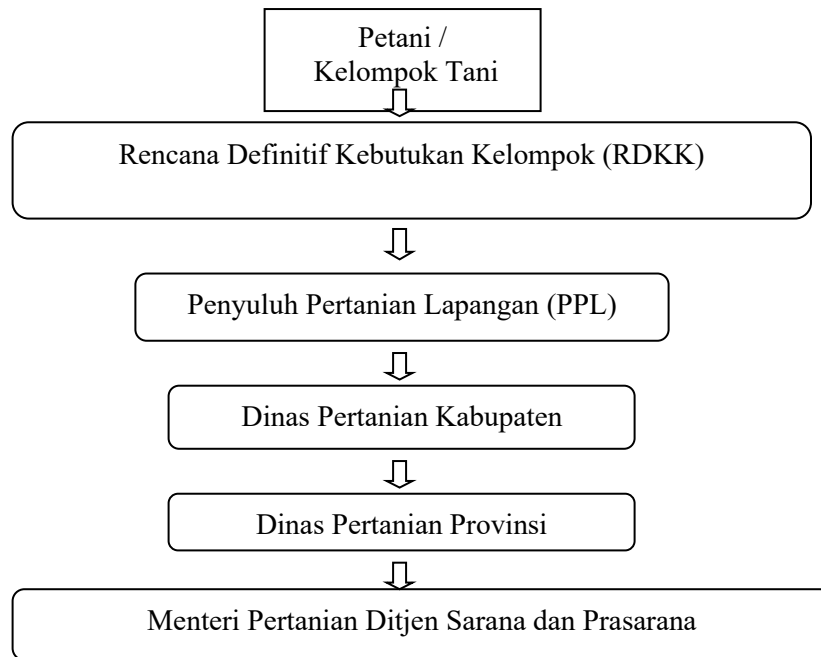
Namun karena petani membutuhkan pupuk bersubsidi ini, maka dengan adanya biaya transportasi menjadi suatu yang dianggap kewajaran bagi petani dan tidak menjadi masalah daripada harus membeli pupuk non subsidi yang jauh lebih mahal.

Mekanisme Perolehan Pupuk Subsidi di Kabupaten Banyuasin

Pupuk adalah material organik maupun anorganik yang mengandung unsur hara yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tanaman tujuannya untuk memaksimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman (Nurhayati, 2016).

Alur distribusi pupuk bersubsidi didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Sesuai dengan pasal 1 ayat 6 yang berisi untuk mencukupi kebutuhan petani di Kabupaten Banyuasin, petani yang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi harus bergabung dengan kelompok tani. Selanjutnya petani mengisi dan mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk kebutuhan satu tahun.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan bersama-sama oleh Gabungan Kelompok Tani (Kelompok Tani). Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dilakukan secara musyawarah dan diselesaikan oleh masing-masing kelompok tani 2 (dua) bulan sebelum musim tanam dimulai. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun ini harus merupakan kebutuhan riil pupuk dari kelompok tani untuk satu tahun periode tertentu dalam pengelolaan usahatannya. Berikut adalah mekanisme perolehan pupuk subsidi di Kabupaten Banyuasin yang digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. Mekanisme perolehan pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuasin

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bagaimana mekanisme perolehan pupuk subsidi pada petani di Kabupaten Banyuasin dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Dimulai dari petani / kelompok tani yang melakukan penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) secara musyawarah dengan anggota kelompok tani. RDKK disusun rangkap 3 (tiga) dan setelah ditanda tangani, untuk lembar yang pertama segera dikirimkan ke pengecer resmi terdekat. Untuk lembar kedua dikirim ke Pertanian Penyuluh Lapangan (PPL) dan untuk lembar yang ketiga dijadikan arsip di kelompok tani.
- 2) Kemudian PPL menyusun rekapitulasi RDKK dari kelompok tani untuk kemudian diberikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten, sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dengan kuota/alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- 3) Selanjutnya Dinas Pertanian Kabupaten akan menyusun rekapitulasi RDKK dari PPL untuk dilaporkan ke Dinas Pertanian Provinsi. Ketika Dinas Pertanian Provinsi menerima RDKK maka akan melakukan kontrol, evaluasi dan tindak lanjut untuk kuota/alokasi pupuk bersubsidi yang sesuai kebutuhan wilayah setempat yang mengacu kepada keputusan Gubernur.
- 4) Kemudian Dinas Pertanian Provinsi akan menyerahkan RDKK untuk pupuk subsidi kepada Menteri Pertanian dan Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian. Di sisi lain dalam proses penyaluran pupuk subsidi Pengecer resmi menyusun rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yang diterima dari kelompok tani yang menjadi binaannya untuk diajukan ke distributor pupuk yang ditunjuk oleh Produsen pupuk. Distributor pupuk subsidi yang berada di wilayah ibukota propinsi selanjutnya berkoordinasi dengan Produsen pupuk subsidi yang ada di dalam negeri.

Implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepala Dinas Pertanian di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, tentang Implementasi kebijakan distribusi

pupuk bersubsidi di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan.

Dari hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung staf pegawai Dinas Pertanian di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, tentang Implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Dari hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi dari berbagai unik dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi. Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh para petani di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, tentang Implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin bahwa implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.

Dari hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan.

a. Komunikasi

Implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh para petani di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, tentang komunikasi pupuk bersubsidi di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin bahwa sebuah strategi dasar yang akan menjadi panutan dan sebuah pengatur rancangan dalam proses komunikasi. Sedangkan konsep komunikasi adalah sarana mengimplementasikan hasil rancangan dari beberapa teori yang akan dan sudah diterapkan, Karena seorang Komunikator itu harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik supaya seorang komunikan dapat menangkap pesan secara cepat dan tepat.

b. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh para petani di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, tentang sumber daya pupuk

bersubsidi di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin bahwa program pupuk bersubsidi mengacu pada penggunaan pupuk yang efektif, yakni pemupukan berimbang sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Dalam penerapan pemupukan berimbang sangat dibutuhkan modal yang cukup.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara langsung oleh para petani di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, tentang disposisi pupuk bersubsidi di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

d. Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada para petani di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, tentang birokrasi pupuk bersubsidi bahwa mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, telah berjalan relatif baik. Pengelolaan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani dilakukan melalui serangkaian pertemuan yang melibatkan pengurus kelompok tani, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala-kepala seksi. Musyawarah anggota kelompok tani dipimpin oleh ketua kelompok guna membahas dan merumuskan RDKK, meneliti kelengkapan dokumen, hingga penandatanganan RDKK sebagai dasar distribusi pupuk. Bentuk pengelolaan pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan sebagai langkah awal pencatatan jumlah dan takaran pupuk yang dibutuhkan hingga penyalurannya kepada petani. Tahapan berikutnya adalah penyaluran yang dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan, serta pengawasan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas distribusi sesuai jumlah dan kebutuhan riil. Selain itu, monitoring dan evaluasi penyediaan serta penyaluran pupuk dilakukan oleh badan pengawasan, dan dilanjutkan dengan proses verifikasi sebagai bentuk pendampingan dalam memastikan pupuk benar-benar sampai dan digunakan oleh petani sesuai dengan kebutuhan mereka di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). *Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). *Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. Journal of Research in Nursing*. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>

- Chakim, M. L. (2020). *Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah*. JURNAL PANGAN. <https://doi.org/10.33964/jp.v28i3.444>
- Heliaantoro, H., & Juwana, H. (2018). *Prespektif Praktek Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15510>
- Nur'aini, R. D. (2020). *Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku*. INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur. <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>
- Raksun, A., Japa, L., & Mertha, I. G. (2019). *Aplikasi Pupuk Organik Dan Npk Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Vegetatif Melon (Cucumis Melo L.)*. Jurnal Biologi Tropis. <https://doi.org/10.29303/jbt.v19i1.1003>
- Setyawati, N. M. A. ., & Yasa, I. G. W. M. (2018). *Pengaruh Subsidi Pupuk, Luas Lahan, Terhadap Biaya Produksi dan Pendapatan Petani Padi di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana.
- Tongco, M. D. C. (2007). *Purposive sampling as a tool for informant selection*. Ethnobotany Research and Applications. <https://doi.org/10.17348/era.5.0.147-158>
- Wardana, R. (2020). *Pengertian Subsidi dan Contoh Kebijakan Subsidi di Indonesia*. 20 Oktober 2020.
- Zahara, E. L. (2021). *Permasalahan Subsidi Pupuk di Indonesia*. Buletin APBN.

